



Semanggi

Kabar **FRAKSI PKS** DPRD KOTA SURABAYA

CEGAH FLUKTUASI
DATA KEPENDUDUKAN
SEPERTI PEMILU 2024,
**DPRD SURABAYA
GAGAS DESK
MONITORING**



[CLICK HERE](#)

ANGGOTA DPRD
SURABAYA SOROTI SOFT
SKILL DAN MODAL IDE
SEBAGAI
**KUNCI UTAMA UMKM
NAIK KELAS**



[CLICK HERE](#)

SURABAYA MAMPU
BAYAR PINJAMAN
RP3.6 TRILIUN UNTUK
INFRASTRUKTUR,
**DPRD PASTIKAN
TIDAK GANGGU
BELANJA WAJIB**



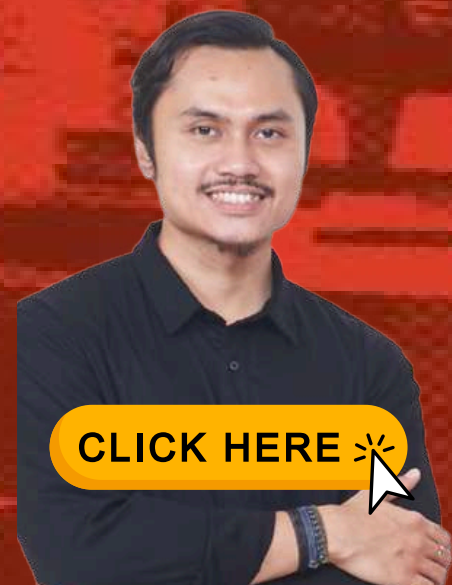
[CLICK HERE](#)

POLEMIK
KEBERADAAN
SPPG DI VILA
BUKIT MAS,
**JOHARI
MUSTAWAN
USULKAN
RELOKASI
SEBAGAI
JALAN TENGAH**



[CLICK HERE](#)

TERKAIT
LAYANAN
VALET PARKIR
DISHUB DI
JALAN
TUNJUNGAN,
**DPRD MINTA
PENATAAN
DROP-OFF
LEBIH RAPI**



[CLICK HERE](#)



[pkspdprdsurabaya](#)



[pkstvdprdsurabaya](#)



[fraksi.pks-surabaya.or.id](#)



CEGAH FLUKTUASI DATA KEPENDUDUKAN SEPERTI PEMILU 2024, DPRD SURABAYA GAGAS DESK MONITORING

Cahyo Siswo Utomo, ST., MH.
Ketua Fraksi PKS & Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya

Surabaya, JatimUPdate.id - Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Cahyo Siswo Utomo, mengatakan pihaknya mewacanakan desk monitoring untuk memantau data kependudukan warga kota Pahlawan lantaran sering naik turun sebelum dan pasca Pemilu.

"Kami ke KPU RI, menyoroti naik turunnya penduduk Surabaya, di beberapa pemilu sebelumnya setiap akan masuk ke pemilu legislatif itu penduduk tidak sampai 3 juta, maka kami cetuskan desk monitoring" beber Cahyo, kepada Jatimupdate.id, Selasa (30/9).

Cahyo berharap, dengan desk monitoring itu terjalin komunikasi yang intens dengan Kemendagri

Pun mendapat kepastian akan validitas jumlah penduduk kota Pahlawan tiap semesternya.

“

Nah ini di pemilu berikutnya kita berharap dengan monitoring, dan koordinasi yang baik dengan kemendagri khususnya, di bagian kita mendapatkan kepastian jumlah penduduk tiap semester dengan validitas yang baik," papar Cahyo.



Ketua Fraksi PKS itu, menegaskan jumlah data kependudukan valid dapat menentukan jumlah kursi di DPRD.

Sehingga desk monitoring tersebut dianggap urgen untuk memantau bertambahnya jumlah penduduk.

“

Pemilu berikutnya jumlah penduduk itu menentukan jumlah kursi yang ada di DPRD Surabaya, itu dampaknya ke sana. Salah satu rekomendasinya adalah kemudian kita ada desk yang memonitor jumlah penduduk tiap semester," demikian Cahyo Siswo.



Sekretaris Komisi A, Syaifuddin Zuhri, mengungkapkan saat ini salah satu dapil di Surabaya menampung hampir 1 juta penduduk.

“Kalau distribusi kursi dibagi secara proporsional, Surabaya bisa memiliki lebih dari lima dapil. Pemekaran ini penting agar keterwakilan masyarakat lebih merata,” tegas legislator asal PDI Perjuangan tersebut.

Sementara anggota Komisi A lainnya, Muhammad Saifuddin menegaskan jumlah penduduk kota Pahlawan sudah tembus 3,08 juta jiwa.

Menurutnya, angka tersebut membuka peluang penambahan kursi legislatif menjadi 55 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

“Jumlah penduduk Surabaya sudah melebihi 3 juta plus 1. Maka sangat dimungkinkan kursi DPRD Surabaya bertambah 5, sehingga totalnya 55 kursi,” kata Saifuddin. (Roy)



SURABAYA
MAMPU BAYAR
PINJAMAN RP3,6
TRILIUN UNTUK
INFRASTRUKTUR,

**DPRD
PASTIKAN
TIDAK
GANGGU
BELANJA
WAJIB**



Hj. Aning Rahmawati, S.T.

Wakil Ketua Komisi C - DPRD Kota Surabaya
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya

LENSA PARLEMEN – SURABAYA

Anggota Badan Anggaran sekaligus Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati, menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dinilai memiliki kemampuan untuk membayar pinjaman daerah sebesar Rp3,6 triliun yang diajukan guna mempercepat pembangunan infrastruktur.

Pernyataan tersebut disampaikannya usai mengikuti rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 bersama jajaran Pemkot Surabaya pada Senin (29/9).



Pinjaman tersebut terdiri atas:

Pokok pinjaman: Rp3,6 triliun

Bunga: Rp467 miliar

Biaya provisi dan lain-lain: Rp36,3 miliar

Total keseluruhan: Rp4,114 triliun

Pinjaman ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang menilai bahwa indikator makroekonomi Surabaya sangat positif, bahkan melampaui rata-rata provinsi Jawa Timur dan nasional.

“Bappenas mendorong percepatan infrastruktur melalui pembiayaan pinjaman. Dari awal usulan Rp2,9 triliun, hari ini akhirnya menjadi Rp3,61 triliun,” ujar Aning kepada media lensaparlemen.id, Senin (29/9).

Rincian Pinjaman Multiyears

Adapun alokasi pinjaman akan disalurkan secara bertahap dalam skema multiyears:

Tahun 2025: Rp452 miliar

Tahun 2026: Rp1,592 triliun

Tahun 2027: Rp1,556 triliun

Jika ditambahkan bunga dan biaya provisi, total beban utang Pemkot mencapai Rp4,114 triliun.

Meski jumlah pinjaman tergolong besar, Aning memastikan hasil analisis fiskal menunjukkan bahwa kemampuan bayar Pemkot tetap dalam batas aman.



Kita melihat semua rasio fiskal, termasuk ruang fiskal yang masih tersedia. Ternyata pemerintah kota mampu membayar utang ini tanpa mengorbankan belanja wajib,” tegasnya.

Efisiensi Belanja Wajib Jadi Kunci

Salah satu strategi utama yang diambil Pemkot adalah melakukan efisiensi terhadap belanja wajib. Dari perencanaan awal sebesar Rp10,5 triliun, dapat ditekan menjadi Rp8,5 triliun. Belanja ini mencakup sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, gaji RT/RW, beasiswa, hingga layanan dasar lainnya.

Efisiensi ini menjaga ruang fiskal tetap tersedia setiap tahunnya, bahkan setelah kewajiban membayar cicilan pokok dan bunga. Berikut proyeksi ruang fiskal Pemkot:

2026: Rp3,997 triliun
2027: Rp3,172 triliun
2028: Rp1,62 triliun

2029: Rp1,607 triliun
2030: Rp3,1 triliun

“Itu artinya, selain membayar utang, kita masih bisa bangun infrastruktur, pemeliharaan, dan layanan publik,” terang Aning.

Fokus pada Infrastruktur Strategis

Dana pinjaman ini akan digunakan untuk membiayai berbagai proyek strategis, seperti:

- Pengendalian banjir
- Penerangan Jalan Umum (PJU)
- Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB)

Pembangunan infrastruktur ini ditargetkan selesai secara bertahap pada 2026 dan 2027.



“

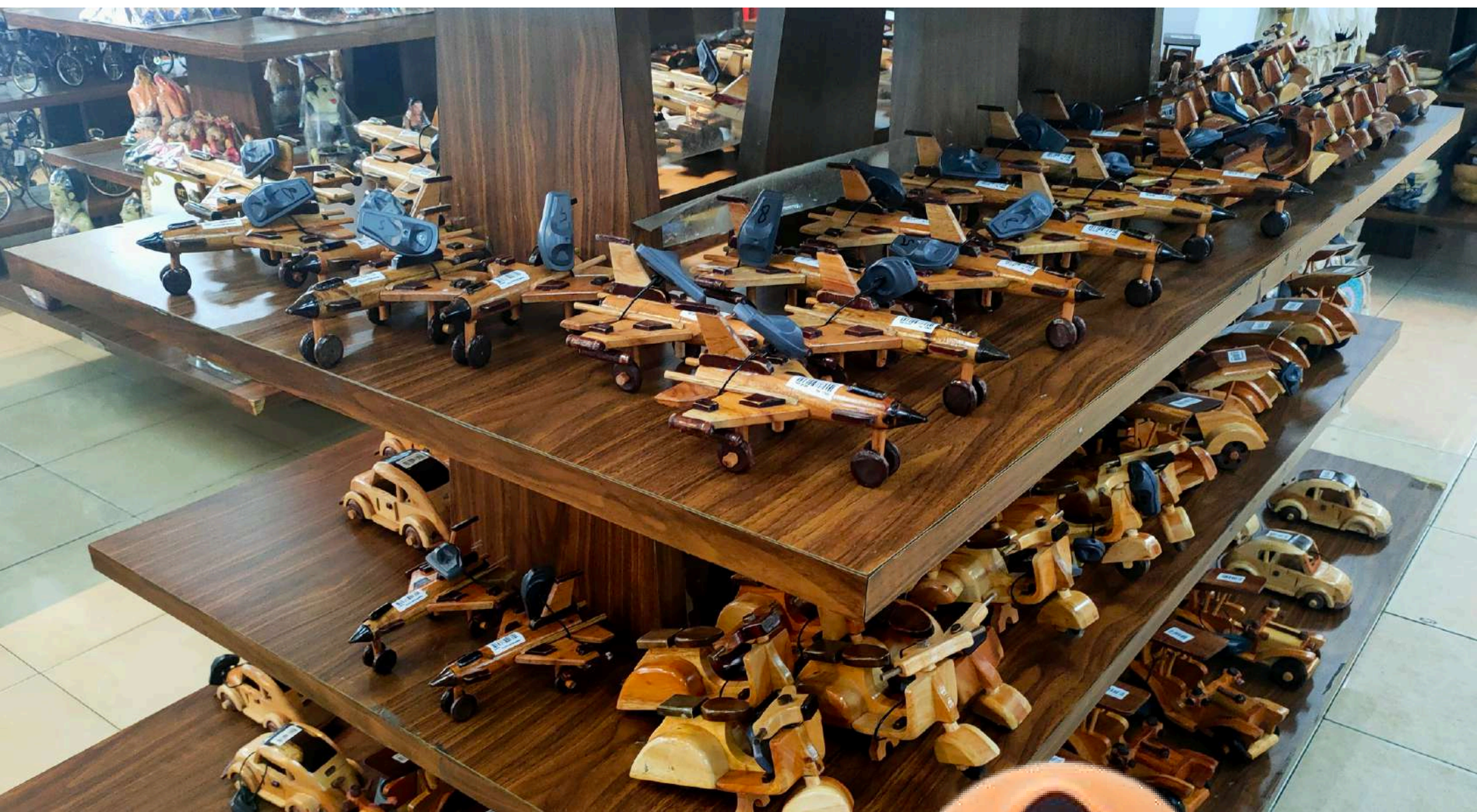
Setelah JLLB selesai, konektivitas Surabaya dengan Teluk Lamong, Mojokerto, dan Gresik akan semakin kuat. Ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menaikkan pendapatan asli daerah (PAD),” imbuhnya.

Mekanisme Transparan dan Pengawasan Ketat

Aning juga memastikan bahwa seluruh proses pinjaman akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pinjaman yang diajukan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) tidak akan langsung masuk ke kas Pemkot, melainkan langsung dibayarkan ke pihak ketiga (pelaksana proyek).

“Pengawasan akan kami lakukan ketat, terutama pada proyek multiyears. Kita pastikan spek teknis, pelaksanaan, dan progresnya sesuai dengan yang sudah disepakati,” tandasnya.

Akhirnya, Aning menegaskan bahwa efisiensi belanja dan pengelolaan utang yang sehat akan terus diuji dan dikawal dalam pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) di tingkat Komisi dan Badan Anggaran DPRD.



ANGGOTA DPRD
SURABAYA
SOROTI SOFT
SKILL DAN
MODAL IDE
SEBAGAI

KUNCI
UTAMA
UMKM
NAIK KELAS



Hj. Enny Minarsih

Anggota Komisi B, Ketua BAPEMPERDA &
Bendahara Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya

Surabaya – Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Ibu Eni Minarsi, menekankan bahwa kunci utama keberhasilan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bukanlah pada besarnya modal awal, melainkan pada karakter pejuang dan pemanfaatan ide serta digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam sebuah diskusi yang berfokus pada perekonomian dan strategi pengembangan UMKM di Surabaya.

Mental Pejuang Lebih Penting dari Modal Uang

Menurut Ibu Eni, yang selama ini dikenal aktif mendampingi UMKM, tantangan terbesar bagi pelaku usaha pemula adalah kendala modal dan mentalitas. Ia memberikan saran tegas agar calon pengusaha menghindari overthinking dan pinjaman utang sebelum usaha dimulai.

“

Bisnis yang paling susah itu yang enggak diwujudkan, yang kepikiran. Jangan sampai UMKM ini terlilit utang dulu padahal belum memulai usahanya," ujar Ibu Eni.



Ia menyoroti bahwa soft skill seorang wirausahawan jauh lebih krusial, meliputi:

Karakter Pejuang: Tidak mudah baperan (emosional) dalam menghadapi tantangan.

Jeli Melihat Peluang: Mampu mengidentifikasi kebutuhan pasar.

Membangun Networking: Memperluas jaringan kerja sama.

Solusi Berbisnis Minim Modal: Mediator Digital

Untuk mengatasi masalah modal, Ibu Eni membagikan strategi "modal ide" dengan mencontohkan kisah seorang ibu rumah tangga yang sukses berwirausaha tanpa modal besar:

“

**Dia modal enggak?
Wong dia dapat
request dulu baru
pesan... Ternyata ambil
di warung sebelah
rumahnya, jusnya... Dia
cuman ini aja kan,
mediator aja. Itu untuk
pemula itu sangat
bagus karena enggak
ada risiko."**



Strategi ini memungkinkan pemula bertindak sebagai mediator atau reseller digital, memanfaatkan media sosial secara gratis untuk memasarkan produk tetangga atau pihak lain. Keberanian langsung praktik dan konsistensi upload di media sosial menjadi kunci utama untuk menghasilkan omset setara gaji kantoran.

Dorongan untuk UMKM di Sentra Wisata Kuliner (SWK)

Terkait upaya Pemkot dalam menyediakan ruang bagi UMKM, Ibu Eni menyoroti bahwa para pedagang di Sentra Wisata Kuliner (SWK) wajib mengikuti perkembangan zaman. Ia mendorong mereka untuk melakukan live streaming dan rajin posting di media sosial.

Selain itu, ia juga mengingatkan Pemkot agar mendukung UMKM dengan memunculkan keunikan lokal, seperti mengolah tanaman mangrove menjadi produk makanan, agar UMKM Surabaya memiliki daya saing yang berbeda di pasar nasional.



POLEMIK
KEBERADAAN
SPPG DI VILA
BUKIT MAS,

JOHARI
MUSTAWAN
USULKAN
RELOKASI
SEBAGAI
JALAN
TENGAH



H. Johari Mustawan, S.T.P., M.A.R.S.

Komisi D DPRD Kota Surabaya - Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Polemik terkait aktivitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan Vila Bukit Mas Cluster Jepang mencuat dalam hearing yang digelar Komisi D DPRD Surabaya bersama warga, pengelola, dan instansi terkait, Kamis 2 Oktober 2025.

Wakil Ketua RT 01, Anthoni Darsono, mengungkapkan keresahan warga yang mayoritas orang tua dan menginginkan ketenangan lingkungan. Ia menyebut keberadaan SPPG dikhawatirkan menimbulkan kerawanan keamanan, limbah, hingga adanya perbedaan izin bangunan.



“Rumahnya banyak kosong, kalau terjadi sesuatu siapa yang bertanggung jawab. Awalnya hanya renovasi, tapi konsepnya berbeda dengan izin pertama,” ujarnya.

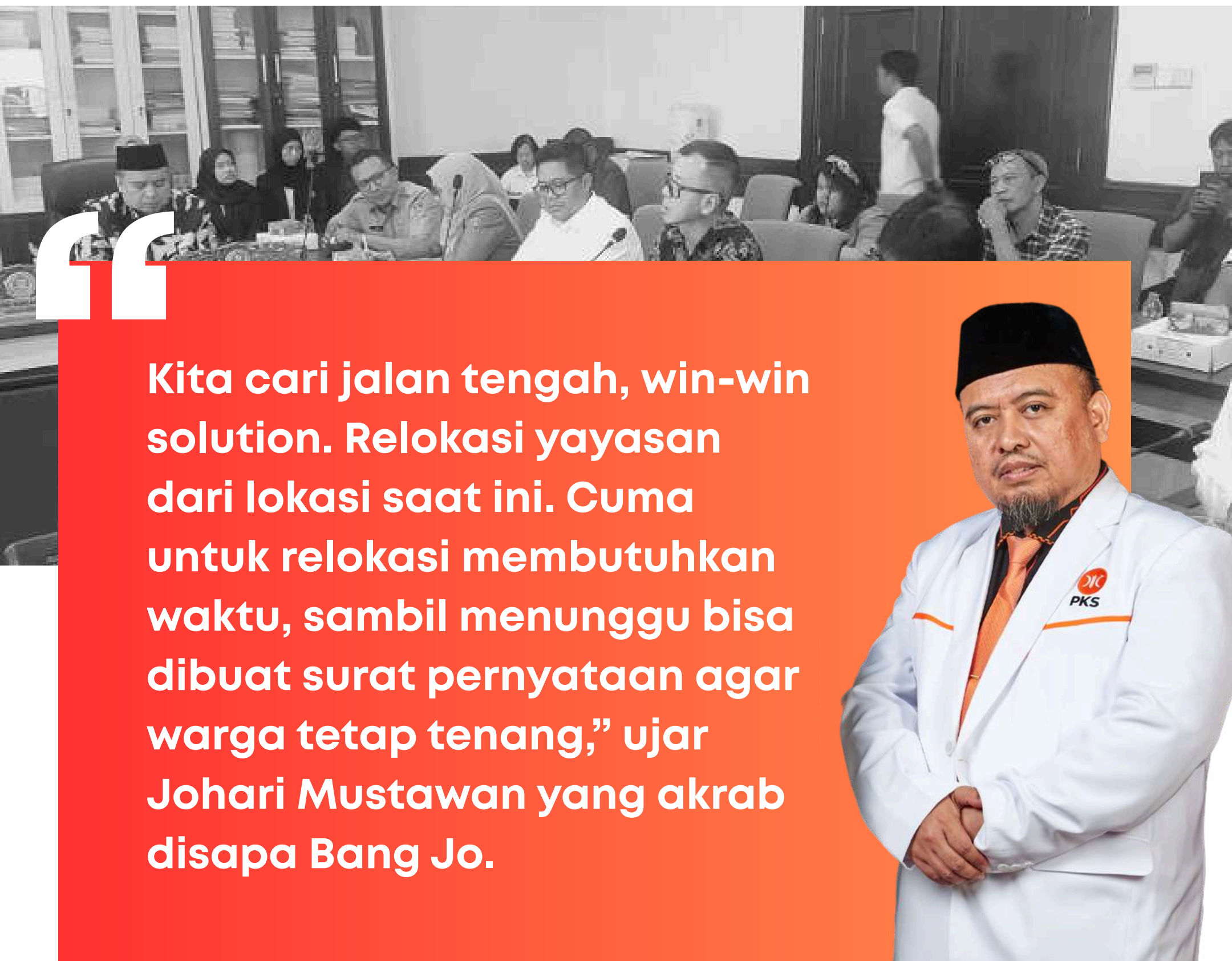
Menanggapi hal tersebut, Ketua Yayasan Ina Makmur sekaligus pengelola SPPG, Joko Dwitanto, menegaskan bahwa pihaknya sudah memiliki izin resmi dari BGN. Ia menyebut program ini menyangkut 3.500 siswa penerima manfaat sehingga tidak bisa dihentikan begitu saja.

Puspita dari Bappedalitbang menambahkan, di zona perumahan masih dimungkinkan pengajuan izin untuk usaha home industry, namun tetap membutuhkan kesepakatan lingkungan dan pengelolaan limbah yang jelas.

Ia menegaskan, Pemkot Surabaya mendukung penuh program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menyasar 57.547 siswa di 17 lokasi.

“Kami akan kawal izin dan fasilitasi komunikasi warga dengan pengelola. Solusi terbaik harus ditempuh bersama,” tegas Puspita.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Surabaya Johari Mustawan menilai dinamika yang terjadi merupakan hal wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Ia menekankan, baik warga maupun yayasan sama-sama memiliki tujuan baik, yakni menjaga ketenangan lingkungan dan menjalankan program pemerintah untuk ribuan siswa penerima manfaat.



Kita cari jalan tengah, win-win solution. Relokasi yayasan dari lokasi saat ini. Cuma untuk relokasi membutuhkan waktu, sambil menunggu bisa dibuat surat pernyataan agar warga tetap tenang,” ujar Johari Mustawan yang akrab disapa Bang Jo.

Ia berharap, polemik ini segera menemukan titik temu tanpa mengorbankan para siswa penerima manfaat. “Kita berharap agar masalah ini tidak sampai mengorbankan 3.500 siswa penerima manfaat dari program MBG,” tambahnya.

Bang Jo juga mengapresiasi pihak yayasan yang berkomitmen mendukung program nasional. “Kami apresiasi kepada masyarakat ataupun kelompok masyarakat yang membantu menyukseskan program pemerintah pusat, program Presiden Prabowo Subianto,” tutupnya. (yat)



TERKAIT
LAYANAN VALET
PARKIR DISHUB
DI JALAN
TUNJUNGAN,

**DPRD MINTA
PENATAAN
DROP-OFF
LEBIH RAPI**

H. Faris Abidin, S.Pi.

Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya
Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya

SURABAYA (Lentera) — Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya akan meluncurkan layanan Valet Parking (Parkir Valet) di kawasan wisata Tunjungan Romansa, sebagai solusi atas persoalan keterbatasan lahan parkir sekaligus memberikan kemudahan bagi pengunjung kawasan legendaris di pusat kota tersebut.

Terkait hal itu, Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Faris Abidin menyambut positif langkah Dishub Surabaya. Menurutnya, program valet parkir bisa menjadi solusi atas permasalahan parkir liar sekaligus menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“

Yang pertama, dengan adanya program valet parkir ini, kebocoran dari parkir liar bisa ditekan sehingga berdampak pada peningkatan PAD. Kedua, ini juga bisa menjawab kebingungan warga terkait tata letak parkir baru di Jalan Tunjungan,” kata Faris pada Lentera, Senin (6/10/2025).



Meski begitu, Faris memberi catatan agar penataan area drop-off dilakukan lebih matang supaya tidak menimbulkan kemacetan di kawasan tersebut.

“Drop-off-nya perlu ditata alurnya agar tidak menimbulkan kemacetan. Petugas valet juga wajib memiliki keterampilan mengemudi yang baik supaya tidak membahayakan pengguna jalan lainnya,” tegasnya.

Menurutnya, inovasi dari Dishub ini patut diapresiasi, namun tetap harus diimbangi dengan pengawasan dan evaluasi rutin, terutama saat masa awal peluncuran program.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub Surabaya, Trio Wahyu Bowo menjelaskan layanan valet merupakan bentuk pelayanan jemput bola dari Pemerintah Kota (Pemkot), untuk membantu masyarakat yang kesulitan mencari parkir.

Menurutnya, petugas valet Dishub Surabaya akan ditempatkan di beberapa titik strategis di Jalan Tunjungan, termasuk di depan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Para petugas akan mengenakan seragam resmi, membawa kartu identitas, serta dilengkapi tanda pengenal Dishub Surabaya.

Mekanismenya, petugas akan menawarkan layanan valet kepada pengendara yang kesulitan mencari parkir. Kendaraan kemudian diparkirkan di Gedung Siola, yang memiliki kapasitas hingga delapan lantai.

“

Dishub menjamin keamanan kendaraan yang diparkir di Gedung Siola. Setelah selesai berjalan-jalan, pengendara cukup menunjukkan karcis, dan kendaraan akan dikembalikan ke lokasi semula,” jelasnya.



Diketahui, layanan valet ini akan dilaunching pada 8 Oktober 2025, dan beroperasi setiap hari pukul 07.00–22.00 WIB. Titik drop-off dan pick-up kendaraan berada di Simpang Jalan Genteng Besar – Jalan Tunjungan, tepat di depan BPN.

Terkait tarifnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah (Perda) No. 7 Tahun 2023, tarif Parkir Valet untuk kendaraan roda empat (R4) di lokasi parkir gedung ditetapkan sebesar Rp10.000 untuk dua jam pertama, Rp2000 untuk setiap jam berikutnya, dan Rp18.000 untuk durasi enam jam atau lebih.

Majalah Digital *Semanggi*



FRAKSI PKS DPRD KOTA SURABAYA

update selalu di media sosial kami

   **pkspdprdsurabaya**

 **pkstvdprdsurabaya**

 **fraksi.pks-surabaya.or.id**